

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Inu Kencana Syafii. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Kusumaatmadja, M. 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy. J 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhadam Labolo. 2015 . *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, N., Ismanu. 2016. *Problematik Rekturmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019 : Antara Regulasi dan Implementasi*.
- Soekanto, S. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*., Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Jurnal
- Dr. Abdul Chalik. (2345). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Situs Web (<https://core.ac.uk/download/pdf/130019747.pdf>), Diakses 10 Maret 2021.
- Dr. Muhadam Labolo., & Teguh, Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal. Universitas Negeri Jakarta; hal 269– 282.
- Dr. Samahuddin Muharram, Msi. 2014. *Banalitas Kontestasi Politik. Kalimantan Selatan*: Universitas Lampung.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

- Richard, Kennedy., & Bonaventura, P. Suhendarto. 2020. *Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid – 19* ; 188 – 204.
- Rohim, N. 2016. *Gagasan Pemilukada Serentak dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi yang Efektif dan Efisien*. Jurnal Nanggroe, 3 : 3
- Ahmad Zaini, M. Zainor Ridho, Riza Pahlevi. 2021. *Legalitas Perppu Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Al Qisthas Vol 12 No. 1 Jan-Jun 2021. ISSN; 2086-9649.
- Aprista Ristyawati. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*. Jurnal Crepido Vol. 02 No.02 November 2020. ISSN; 2715-2863
- Ni Wayan Trisna Utami Sumadana dan Made Gde Subha Karma Resen. 2021. *Efektivitas Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi COVID-19 Di Provinsi Bali*”. Jurnal Kertha Desa Vol. 8 No. 10 2021. ISSN; 2302-528X.
- Reka Bayu Pramana, dkk. 2021. *Potensi Masalah Pilkada Serentak 2020 dan Kekhawatiran Masyarakat Pemilih Muda*. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.05 No. 02 Februari 2021. ISSN; 2622-9633
- Sarjan, Kemal Al Kindi Mulya, dan Siti Chadijah. 2020. *Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No.1 Agustus 2020 . ISSN; 2622-6235.
- Sholahudin Al-Fatih. 2021. *“Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya”*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 April 2021. ISSN; 2776-7183.
- Supriyadi. 2020. *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan PILKADA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19*”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 3 Desember 2020, PP: 493-514.

Undang – Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen)

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang..

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum,

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Undang- Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang

Peraturan KPU no, 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam masa covid 19.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan rumusan Pasal 18 ayat (4)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020.

Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 ini adalah tentang Tugas dan Wewenang KPU

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

Sumber Internet

<https://regional.kompas.com/read/2020/12/16/12285251/iwan-iip-siap-gugat-hasil-pilkada-tasikmalaya-ke-mk-klaim-punya-banyak-bukti>.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5311815/paslon-iip-iwan-gugat-hasil-pilkada-tasikmalaya-2020-ke-mk>.

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011133330/hasil-pilkada-tasikmalaya-digugat-ke-mk-tim-wani-laporkan-indikasi-kecurangan-di-tingkat-kecamatan?page=1+2>

<https://literasinews.pikiran-rakyat.com/politik/pr-921132644/menilai-banyak-kecurangan-pasangan-iwan-iip-mantap-ajukan-gugatan-ke-mk>

<https://radargarut.jabarekspres.com/2021/03/19/gugatan-wani-ditolak-mk/>